



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545

LAPORAN TAHUNAN

2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dapat menyelesaikan Laporan Tahunan. Laporan Tahunan 2019 merupakan refleksi pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Natuna tahun 2016 - 2021.

Disamping itu, penyajian Laporan Tahunan merupakan wujud dari transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan review untuk meningkatkan kinerja dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun mendatang untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Akhir kata semoga Laporan Tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Panai, Desember 2019

Kepala



R. DICKY KUSNIADI, SE
NIP. 196605031987031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 SEJARAH BERDIRINYA BPKAD.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM.....	3
A. Tugas	3
B. Fungsi	3
C. Kewenangan	4
D Struktur Organisasi Perangkat Daerah	4
E Sumber Daya Manusia	16
F Sarana dan Prasarana.....	19
BAB III ISU-ISU TRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI FUNGSI.....	20
A Visi dan Misi RPJMD 2016 - 2021	20
B Program Prioritas BPKAD Pendukung Visi Misi RPJMD 2016 - 2021.....	23
C Program BPKAD Yang Tertuang Dalam RPJMD yang tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021 yang disertai Pendanaannya.....	34
D Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas.....	37
BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	40
A Pelaksanaan Program / Kegiatan 3 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi Tahun 2017, 2018 dan 2019)	40
B Program/Kegiatan dan Target Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun 2020.....	55

C	Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017, 2018 dan 2019.....	58
D	Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, 2018 dan 2019.....	60
E	Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik Pusat, Provinsi, Kabupaten Dengan Kabupaten Lainnya.....	62
F	Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.....	63
BAB V	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI	70
A	Kesimpulan.....	70
B	Rekomendasi	71

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Komposisi Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel	2.2	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel	2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang	17
Tabel	2.4	Komposisi Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel	2.5	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel	2.6	Komposisi Pegawai PNS Menurut Diklat Kepemimpinan Tahun 2019.....	18
Tabel	2.7	Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Tahun 2019	19
Tabel	3.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah	24
Tabel	3.2	Program Prioritas Pendukung Visi Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2019 - 2021	33
Tabel	3.3	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35
Tabel	3.4	Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Sebelum Perubahan) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38
Tabel	3.5	Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Setelah Perubahan) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39
Tabel	4.1	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017	41
Tabel	4.2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	42
Tabel	4.3	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	47
Tabel	4.4	Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	49
Tabel	4.5	Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	51

Tabel 4.6	Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	53
Tabel 4.7	Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56
Tabel 4.8	Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2017, 2018 & 2019	
Tabel 4.9	Capaian Indikator Pembangunan Daerah RPJMD 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2017, 2018 & 2019.	61
Tabel 5.1	Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2019	65
Tabel 5.2	Laporan Realisasi Anggaran Bidang Anggaran Tahun 2019	67
Tabel 5.3	Laporan Realisasi Anggaran Bidang Akutansi Keuangan Daerah Tahun 2019	68
Tabel 5.4	Laporan Realisasi Anggaran Bidang Aset Tahun 2019	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Struktur Organisasi	10
--------	-----	---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbentuk setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi landasan Kabupaten Natuna untuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pada saat itu masih dalam struktur organisasi di Sekretariat Daerah yaitu Bagian Keuangan. Kemudian pada tahun 2005, dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Kemudian pada tahun 2008 Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dilakukan perubahan menjadi Organisasi Perangkat Daerah tersendiri menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Namun pada tahun 2011 berubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Setelah beberapa tahun berubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah melakukan penyesuaian Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna, secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

A. Tujuan

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas **“Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya”**.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;

3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran dan belanja daerah serta Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan dengan instansi terkait;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan dan aset daerah dengan instansi terkait;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

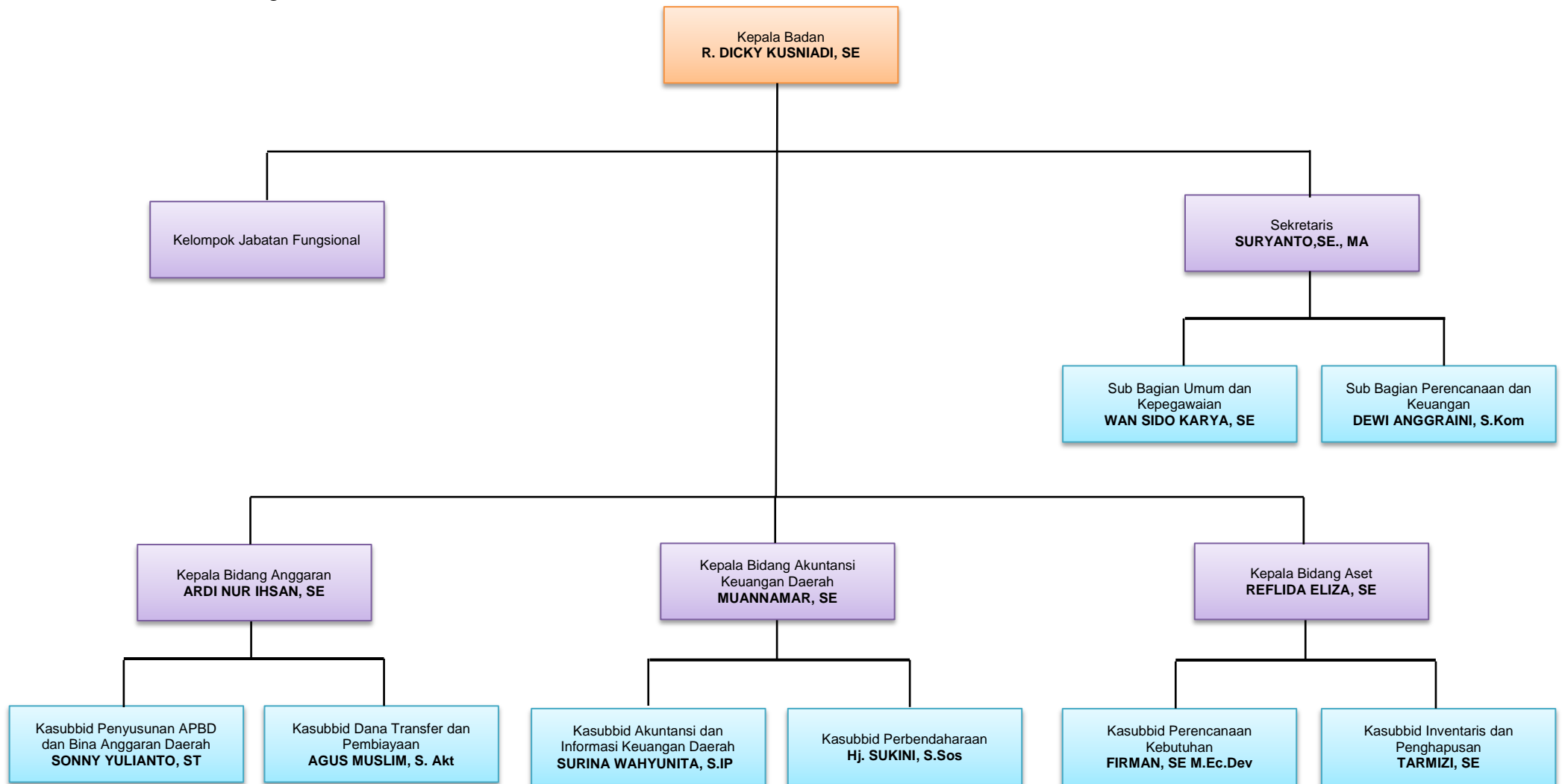
C. Kewenangan

Badan merupakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Bagian Sekretaris, terdiri dari:
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - i. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah;
 - ii. Sub Bidang Dana Transfer dan Pembiayaan.
4. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - i. Sub Bidang Akuntansi dan informasi Keuangan Daerah;
 - ii. Sub Bidang Perbendaharaan.
5. Bidang Aset, terdiri dari:
 - i. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
 - ii. Sub Bidang Inventaris dan Penghapusan.

Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijelaskan dibawah ini:

1. Badan

Kepala Badan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- a. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;

3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya dengan instansi terkait;
 6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
 7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
 8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
 10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Kepala menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Ikhtisar Jabatan memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas Badan.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

- a. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kerja lima tahun badan dan dilingkup sekretariat;
 2. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
 3. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
 4. Menyusun pelaporan badan;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 6. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan badan;
 7. Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja badan;
 8. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup sekretariat;
 9. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- b. Fungsi Sekretariat terdiri dari:
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat;
 2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Anggaran

Ikhtisar Jabatan meleksanakan perencanaan, koordinasi, penyusunan program/kegiatan, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi, analisa, dokumentasi, pendataan, serta membuat laporan hasil kerja di Bidang Anggaran, berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundnag-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Tugas pokok dalm perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan, Penyusunan pedoman dan petunjuk teknsi penyusunan anggaran sesuai peraturan keuangan yang berlaku agar tertib administrasi, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar. Mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, penyusunan laporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, Invenstasi Jangka Pendek, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Piutang.

- a. Uraian Tugas Bidang Anggaran sebagai berikut:
1. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang APBD;
 2. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang P-APBD;
 3. Menyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD DN RKA-PPKD;
 4. Menyusun pedoman penyusunan PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD;
 5. Mengevaluasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD untuk menyusun rancangan APBD;
 6. Mengevaluasi PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD untuk menyusun rancangan Perubahan APBD;
 7. Mengevaluasi DPA-SKPD dan DPA-SKPKD;
 8. Mengevaluasi DPPA-SKPD dan DPPA SKPKD;
 9. Mengevaluasi pergeseran anggaran;
 10. Menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
 11. Merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan APBD;
 12. Merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dalam rangka penyusunan RAPBD;
 13. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
 14. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 15. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLUD;
 16. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja JKN;
 17. Menyusun laporan penyertaan modal;
 18. Menyusun laporan dana bergulir;
 19. Menyusun investasi jangka pendek;
 20. Menyusun tunjangan profesi guru PNSD;

21. Menyusun tambahan penghasilan guru PNSD;
 22. Menyusun piutang hasil temuan.
- b. Fungsi Bidang Anggaran sebagai berikut:
1. Penyusunan dan perumusan program kerja di bidang Anggaran;
 2. Pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis petunjuk rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. Pelaksanaan penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 4. Menyiapkan data dana perimbangan;
 5. Menyelenggarakan penyertaan modal, dana bergulir dan pinjaman daerah;
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 7. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang anggaran;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pemimpin berdasarkan hasil kerja;
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Aset

Ikhtisar jabatan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi.

Tugas pokok bidang aset penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah.

- a. Uraian tugas bidang aset sebagai berikut:
1. Menyusun dan menyiapkan rencana operasional program dan kegiatan bidang aset;
 2. Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi maupun lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

3. Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
 4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
 5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) dari masing-masing SKPD kepada Kepala Daerah melalui kepala Badan;
 6. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 7. Meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 8. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah;
 9. Memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- b. Fungsi bidang aset sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan lingkup aset;
 2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang aset;
 3. Pelaksanaan pengawas dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Ikhtisar jabatan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku.

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- a. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:
 1. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan perbendaharaan berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 3. Menyusun rekapitulasi realisasi gaji PNS dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan DAU setiap bulannya;
 4. Memeriksa verifikasi SPM, penerbitan SP2D, penandatanganan bilyet giro SKPD, penerbitan SKPP;
 5. Menyusun laporan pemungutan/pemotongan iuran PFK, iuran wajib pajak dan taperum gaji pegawai, laporan penempatan uang, laporan pengeluaran piutang dan utang daerah;
 6. Menyusun surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN;
 7. Mengadakan evaluasi dengan SKPD terkait rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D;
 8. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

9. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
 10. Menyiapkan pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 11. Mengkoordinasikan penyiapan pelaporan kas;
 12. Mengkoordinasikan penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran berjalan (Laporan Keuangan Bulanan (LRA) Laporan Keuangan Triwulan (LRA) dan Laporan Keuangan Semester (LRA, LO dan Neraca);
 13. Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD;
 14. Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya.
- b. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:
1. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan program kerja dan kegiatan lingkup Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
 3. Melakukan analisis pemberdayaan dalam penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
 4. Melaksanakan verifikasi atas SPM dari SKPD dan penerbitan SP2D;
 5. Pelaksanaan verifikasi dalam penerbitan SKPP;
 6. Pelaksanaan verifikasi atas pemungutan/ pemotongan dan penyetoran PFK;
 7. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 8. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 9. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem tata usaha keuangan daerah dan penggajian;

10. Melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
11. Menyusun laporan keuangan daerah;
12. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
13. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi APBD.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki kedudukan sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi “*Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah*”. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa Pejabat Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. Kepala SKPD selaku PA.

Selaku SKPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. Melaksanakan fungsi BUD; dan

5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sumber Daya Manusia

1. Kepegawaian

a. Komposisi Pegawai PNS dan Non PNS

Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	27
2	Perempuan	22
	Jumlah	49

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Non PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	11
	Jumlah	26

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Pegawai Menurut Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Komposisi Pegawai menurut pangkat dan golongan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang
Tahun 2019

No	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda Tk. I (IV/c)	-
	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	3
	Jumlah	4
2	Penata Tk. I (III/d)	7
	Penata (III/c)	3
	Penata Muda Tk. I (III/b)	14
	Penata Muda (III/a)	6
	Jumlah	30
3	Pengatur Tk. I (II/d)	8
	Pengatur (II/c)	5
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	13
4	Juru Tk. I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda (I/b)	-
	Juru Tk. I (I/a)	-
	Jumlah	-
5	Pegawai Honorer Daerah	25
	Jumlah	25
	Jumlah Keseluruhan	72

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Klasifikasi pendidikan PNS disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	25
3	Diploma	3

4	SLTA	17
Jumlah		47

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai Non PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Komposisi pegawai Non PNS Daerah
menurut tingkat pendidikan
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	12
2	Diploma	2
3	SLTA	10
4	SLTP	1
5	SD	1
Jumlah		25

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

d. Pegawai Mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan

Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Komposisi pegawai menurut diklat kepemimpinan
Tahun 2019

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	PIM II	1
2	PIM III	1
3	PIM IV	4
Jumlah		6

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2019

E. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah didukung oleh sarana dan prasarana dibawah ini:

Tabel 2.7
Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2019

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang
1	Mobil	3 Unit	Baik
2	Sepeda Motor	19 Unit	Baik
3	Komputer/PC	64 Unit	Baik
4	Notebook	36 Unit	Baik
5	Laptop	11 Unit	Baik
6	Mesnin Hitung Listrik	1 Unit	Baik
7	UPS	30 Unit	Baik
8	Printer	68 Unit	Baik
9	Scanner	7 Unit	Baik
10	Server	3 Unit	Baik
11	Brankas	3 Unit	Baik
12	Alat Penghancur Kertas	14 Unit	Baik
13	AC	32 Unit	Baik
14	Proyektor/Infokus	2 Unit	Baik
15	Mesin Hitung	4 Unit	Baik
16	Mesin Fotocopy	1 Unit	Baik
17	Mesin Fingerprint	1 Unit	Baik
18	Faximile	2 Unit	Baik
19	Telepon (PABX)	1 Unit	Baik
20	GPS	8 Unit	Baik
21	Meja	96 Unit	Baik
22	Kursi	93 Unit	Baik
23	Filling Cabinet	19 Unit	Baik
24	Meja Rapat	2 Unit	Baik
25	Kursi Tunggu	8 Unit	Baik
26	Rak Buku	5 Unit	Baik
27	Almari Kayu	20 Unit	Baik
28	Sofa	2 Unit	Baik
29	Rak Besi	4 Unit	Baik
30	Kursi Rapat	136 Unit	Baik
31	Almari Alumunium Kaca	5 Unit	Baik
32	Almari Besi	9 Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi dan Misi RPJMD 2016 - 2021

Apa itu visi dan misi (*vision and mission*)? Pengertian **visi dan misi** adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu. Visi dan misi ini secara proses lahir dari organisasi tersebut didirikan dan menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi. Hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk tulisan agar semua pihak, baik internal maupun eksternal, mengetahui tujuan dari organisasi yang didirikan.

Secara umum, pengertian visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Visi juga merupakan cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa depan yang dibuat secara tertulis, di dalam visi biasanya terdapat pandangan tentang arah suatu manajemen kemana arah perusahaan tersebut dibawa.

Sedangkan pengertian misi secara umum adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi dimana dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya.

Dari pengertian diatas, Pemerintah Kabupaten Natuna periode 2016 - 2021 memiliki visi yaitu “**Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan**”, pernyataan tersebut memiliki makna, pertama cerdas berarti masyarakat yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Sedangkan Mandiri memiliki makna masyarakat yang mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam

rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.

Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Masyarakat berbudaya memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan visi tersebut, selanjutnya dituangkan dalam misi dan merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dalam mencapai visi yang dimaksud. Keberhasilan Pemerintah Daerah harus didukung oleh unit kerja dibawahnya dan harus responsif serta inovatif dalam menginterpretasikan visi dan misi kepala daerah. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah;
- b. Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik;
- c. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani;
- d. Membuka Keterisoliran Daerah/desa melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan;
- e. Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu sebagai Payung Pembangunan Daerah;
- f. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.**

Sebagai bentuk dukungan dan tanggungjawab terhadap misi, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menitikberatkan pada misi yang ke-6 yaitu **"Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat"**. Untuk mencapai visi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah diformulasikan dengan menitikberatkan pada tujuannya yaitu Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

B. Program Prioritas BPKAD Pendukung Visi Misi RPJMD 2016 - 2021

Dalam mencapai target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi dijadikan sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas, guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang tidak terpisahkan di setiap strategi dan arah kebijakan. Dengan itu, dibutuhkan arah kebijakan yang memberikan optimalisasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui program daerah. Program-program pada masing-masing arah kebijakan disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja. Dalam mengidentifikasi program-program prioritas yang bersifat strategis dilakukan dengan cara menganalisis strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dan ditentukan, kemudian dijabarkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang sifatnya paling krusial. Sehingga akan terjalin keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan program yang ditetapkan. Dengan demikian maka akan terlihat alur keterkaitan antara program dengan strategi dan arah kebijakan menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan antara program prioritas dengan sasarannya. Program pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada perencanaan pembangunan daerah periode 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
Meningkatnya aktifitas ekonomi daerah	S1.Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi daerah	1. Pengembangan kawasan minapolitan	1.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Dinas Perikanan
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian,kehutanan dan perikanan			2.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Dinas Perikanan
			3.	Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Penataan Tanah	Luas kawasan industri perikanan (ha)	Dinas Perikanan
		2. Pengembangan kawasan agropolitan	4.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi pertanian/ perkebunan (ton)	Dinas Pertanian
			5.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase kelompok peternak yang menggunakan teknologi	Dinas Pertanian
6.			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak (ekor)	Dinas Pertanian	
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan		3. Peningkatan daya saing produk daerah	7.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi	Dinas Pertanian
			8.	Program Peningkatan Kerjasama Internasional	Ekspor bersih perdagangan	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata		4. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan pariwisata	9.	Program Pengembangan Teknologi Pedesaan	Jumlah pemanfaat TTG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			10.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			11.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara - Rata-rata lamatinggal wisatawan	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
					nusantara	
				12. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah	Jumlah lahan yang dibebaskan (ha)	
Meningkatnya nilai investasi di sektor potensial daerah		5.	Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah	13. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				14. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (%)	
Menurunnya pencemaran air	S2. Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup	6.	Peningkatan konservasi hutan dan sumber air	15. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas lahan konservasi	Dinas Lingkungan Hidup
				16. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH	
		7.	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	17. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luas lahan yang direhabilitasi (ha)	Dinas Lingkungan Hidup
				18. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Volume limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan (m3/hari)	
				19. Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Volume sampah yang diangkut perhari	
Meningkatnya IPM						
Meningkatnya kualitas pendidikan	S3. Pemerataan dan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	8.	Peningkatan mutu, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan	20. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				21. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B	
				22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah pelayanan data pendidikan, kepemudaan dan olah raga	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah	
		9.	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik	23.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Rata-rata nilai UASBN dan UN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				24.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai rata-rata uji kompetensi guru (UKG)	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	10.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan secara merata	25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan di desa	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
				26.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara	
		11.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan obat masyarakat	27.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		12.	Peningkatan promosi kesehatan	28.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
						Persentase kecamatan yang mempunyai kebijakan PHBS	
			Persentase rumah tangga yang ber PHBS				
		13.	Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat	29.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan alkes di pelayanan kesehatan dasar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase ketersediaan biaya rutin Puskesmas							

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah	
					Persentase kepesertaan jaminan kesehatan		
				30. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Puskesmas yang memiliki kapasitas penanganan HIV AIDS Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar Persentase penanggulangan penyakit menular Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)		
Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	S5. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	14.	Peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai potensi daerah	31.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatimam yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				32.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	
		15.	Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha) berperspektif gender	33.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Jumlah wirausaha	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				34.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
				35.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kasus anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	S6. Percepatan pengentasan Kemiskinan	16.	Perbaiki masalah kesejahteraan sosial masyarakat	36.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial (jiwa)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
				37.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah		Indikator Program	Perangkat Daerah
		17.	Pengembangan dan pembangunan ekonomi masyarakat miskin	38.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
				39.	Program Penanganan Daerah Rawan Pangan	Angka rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	S7. Pengembangan ekonomi kerakyatan	18.	Pengembangan sentra produksi Industri pengolahan (kawasan industri)	40.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				41.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi PDRB Sektor Industri	
		19.	Penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	42.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				43.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan masyarakat pedesaan	
		20.	Pembentukan Sentra Usaha ekonomi masyarakat	44.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah rata-rata produksi IKM	Dinas Perindag, Koperasi dan Usaha Mikro
				45.	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	
	46.			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah produk unggulan UMKM		
	Meningkatnya kesejahteraan petani	S8. Pengembangan Agribisnis	21.	Optimalisasi kelembagaan pertanian	47.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani (NTP)
48.					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh bersertifikat	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah	
Meningkatnya konektivitas kecamatan/desa	S9. Peningkatan akses ke kawasan terisolir	22.	Pembukaan dan perluasan jalan ke kawasan terisolir	49.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan baru yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		23.	Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	50.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				51.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	
				52.	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	
		24.	Peningkatan konektivitas antar wilayah	53.	Program Pengadaan Sarana dan Pasarana Transportasi Darat Antar Desa di Daerah Tertinggal	Persentase desa yang menerima bantuan moda angkutan barang dan angkutan penumpang	Dinas Perhubungan
				54.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang baik	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah	S10. Peningkatan akses ke kawasan ekonomi	25.	Penyediaan transportasi antar pulau/desa/kecamatan/kawasan	55.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
26.	Penyediaan infrastruktur kepelabuhan seperti kapal angkutan barang dan penumpang yang memadai			56.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang dan barang yang diangkut	Dinas Perhubungan
				57.	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Transportasi Kepulauan Antar Desa/Pulau-pulau Kecil di Daerah Tertinggal	Persentase kecamatan yang menerima bantuan moda angkutan barang dan angkutan penumpang	
Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	S.11 Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal	27.	Peningkatan pelayanan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	58.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Satpol PP, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah			
				59.	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penegakan Perda	Satpol PP, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		
				60.	Program Pembinaan Keagamaan	Persentase pembinaan sosial budaya dan kemasyarakatan	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)		
		28.	Optimalisasi peran kelembagaan budaya dan agama dalam pembinaan masyarakat	61.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah nilai budaya yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
				62.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kekayaan budaya yang dikelola			
Terwujudnya kesadaran berbudaya melayu				63.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Benda, situs dan kawasan cagara budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
				30.	Pengembangan peran lembaga kebudayaan di setiap kecamatan	64.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				31.	Peningkatan promosi, penyelenggaraan festival seni budaya	65.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih	S12. Reformasi Birokrasi			66.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Inspektorat		
				33.	Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	67.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya kinerja				34.	Pemanfaatan teknologi	68.	Program Pengembangan Komunikasi,	Jumlah website perangkat daerah	Dinas Komunikasi dan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Perangkat Daerah
dan akuntabilitas organisasi		informasi dalam pelayanan masyarakat dan kinerja aparatur		Informasi dan Media Massa		Informatika
Meningkatnya kualitas layanan publik		35. Penerapan standar pelayanan (SP) sesuai dengan SPM	69.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase PD yang melaksanakan SPM	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)
		36. Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur PD	70.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase kelulusan peserta Diklat PIM III dan IV yang lulus sekali ujian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
					Persentase kelulusan peserta diklat teknis	
					Persentase kelulusan peserta diklat fungsional	
Persentase Widyaiswara yang memenuhi syarat kompetensi						
Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	37. Optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	71.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			72.	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi tersebut diatas telah diformulasi program pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada perencanaan pembangunan daerah periode 2016-2021, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna menetapkan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan” dengan Indikator Program (*Outcame*) “Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku”, untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
 Program Prioritas Pendukung Visi Misi RPJMD
 Kabupaten Natuna Tahun 2019 - 2021
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

dalam ribuan

Kode	Misi, Tujuan, Sasaran Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2016	Tahun 1 2017		Tahun 2 2018		Tahun 3 2019		Tahun 4 2020		Tahun 5 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3.02.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	100%	100%	2.836.853	100%	2.779.482	100%	2.510.000	100%	3.910.000	100%	4.774.000	100%	16.810.335
Jumlah			100%	100%	2.836.853	100%	2.779.482	100%	2.510.000	100%	3.910.000	100%	4.774.000	100%	16.810.335

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016 - 2021 Lampiran VII

C. Program BPKAD Yang Tertuang Dalam RPJMD yang tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021 yang disertai pendanaannya

Dalam mendukung RPJMD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan beberapa program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah;
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah;
10. Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah;
11. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya akan disajikan indikasi rencana program prioritas sebagaimana terlampir dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya
Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

dalam ribuan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,236,643	12 Bulan	1,917,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,353,200	60 Bulan	10,641,443
3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	65%	349,000	65%	219,000	70%	219,000	70%	219,000	75%	219,000	75%	1,225,000
3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	75,000	90%	120,000	90%	120,000	95%	120,000	95%	120,000	95%	555,000
3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	55%	170,000	60%	170,000	65%	170,000	70%	170,000	75%	170,000	75%	850,000
3.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	B / 68,35	BB / 74,00	120,000	BB / 76,00	100,000	BB / 76,00	120,000	BB / 76,00	120,000	A / 80,00	120,000	A / 80,00	580,000
3.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	595,360	2 Aplikasi	540,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	740,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	3,155,360
		Opini Audit PBK	WTP/ 100 %	WTP/ 100 %	1,435,000	WTP/ 100 %	1,785,113	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	990,000	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	5,590,113
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100%	1,116,493	100%	1,014,482	100%	1,490,000	100%	2,490,000	100%	3,754,000	100%	9,864,975
3.02.32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	16	16	700,000	17	600,000	17	600,000	17	600,000	18	600,000	18	3,100,000
		Jumlah Objek Pajak	548	603	2,055,280	663	1,615,000	729	2,069,595	802	2,269,595	857	2,069,595	857	10,079,065
		Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	4,40 %	4,65 %	400,000	4,92 %	400,000	4,69 %	400,000	5,05 %	400,000	5,64 %	400,000	5,64 %	2,000,000
		Persentase Peningkatan PAD	10	10	344,360	10	365,000	10	570,000	20	570,000	30	570,000	30	2,419,360
3.02.52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	60 Bulan	6,430,190
3.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompentensi	80%	80%	850,000	80%	600,000	85%	800,000	90%	800,000	100%	800,000	100%	3,850,000

3.02.56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Persentase LHP yang ditindak lanjuti	84.71	84.71	200,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	1,436,500
		Persentase Kinerja Keuangan Daerah	60%	80%	250,000	80%	250,000	82%	250,000	84%	250,000	86%	250,000	86%	1,250,000
3.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	42%	1,909,000	44%	1,400,000	46%	1,400,000	48%	1,200,000	50%	1,200,000	50%	7,109,000
		Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	42%	200,000	44%	100,000	46%	100,000	48%	100,000	50%	150,000	50%	650,000

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016 - 2021
Lampiran VIII

D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas

Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja dan program dan kegiatan prioritas tertuang di dalam Renstra. Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Berikut disajikan Matrik Renstra Perangkat Daerah sebelum dan sesudah perubahan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Sebelum Perubahan)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM SEBELUM PERUBAHAN										Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1. Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Terwujudnya laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel; Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan RAPBD; 2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; 3. Meningkatkan penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD; 2. Nilai Evaluasi AKIP; 3. Persentase	3.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,236,643	12 Bulan	1,917,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,353,200	60 Bulan	10,641,443	BPKAD
			3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	65%	349,000	65%	219,000	70%	219,000	70%	219,000	75%	219,000	75%	1,225,000	BPKAD
			3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	75,000	90%	120,000	90%	120,000	95%	120,000	95%	120,000	95%	555,000	BPKAD
			3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	55%	170,000	60%	170,000	65%	170,000	70%	170,000	75%	170,000	75%	850,000	BPKAD
			3.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	B / 68,35	BB / 74,00	120,000	BB / 76,00	100,000	BB / 76,00	120,000	BB / 76,00	120,000	A / 80,00	120,000	A / 80,00	580,000	BPKAD
			3.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	595,360	2 Aplikasi	540,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	740,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	3,155,360	BPKAD
					Opini Audit PBK	WTP/ 100 %	WTP/ 100 %	1,435,000	WTP/ 100 %	1,785,113	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	990,000	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	5,590,113	BPKAD
					Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100%	1,116,493	100%	1,014,482	100%	1,490,000	100%	2,490,000	100%	3,754,000	100%	9,864,975	BPKAD
			3.02.32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	16	16	700,000	17	600,000	17	600,000	17	600,000	18	600,000	18	3,100,000	BP2RD
					Jumlah Objek Pajak	548	603	2,055,280	663	1,615,000	729	2,069,595	802	2,269,595	857	2,069,595	857	10,079,065	BP2RD
					Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	4,40 %	4,65 %	400,000	4,92 %	400,000	4,69 %	400,000	5,05 %	400,000	5,64 %	400,000	5,64 %	2,000,000	BP2RD
					Persentase Peningkatan PAD	10	10	344,360	10	365,000	10	570,000	20	570,000	30	570,000	30	2,419,360	BP2RD
			3.02.52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	60 Bulan	6,430,190	BPKAD
			3.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparaturnya yang berkompentensi	80%	80%	850,000	80%	600,000	85%	800,000	90%	800,000	100%	800,000	100%	3,850,000	BPKAD
			3.02.56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Persentase LHP yang ditindak lanjuti	84.71	84.71	200,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	309,100	100	1,436,500	BPKAD
Persentase Kinerja Keuangan Daerah	60%	80%			250,000	80%	250,000	82%	250,000	84%	250,000	86%	250,000	86%	1,250,000	BPKAD			
3.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	42%	1,909,000	44%	1,400,000	46%	1,400,000	48%	1,200,000	50%	1,200,000	50%	7,109,000	BPKAD			
		Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	42%	200,000	44%	100,000	46%	100,000	48%	100,000	50%	150,000	50%	650,000	BPKAD			

Sumber : Renstra BPKAD 2016 - 2021

Tabel 3.5
Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Setelah Perubahan)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM SETELAH PERUBAHAN										Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1. Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Terwujudnya laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel; Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan RAPBD; 2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; 3. Meningkatkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD; 2. Nilai Evaluasi AKIP; 3. Persentase	3.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,236,643	12 Bulan	1,917,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,353,200	60 Bulan	10,641,443	BPKAD	
			3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	65%	349,000	65%	219,000	70%	219,000	70%	219,000	75%	219,000	75%	1,225,000	BPKAD	
			3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	85%	75,000	90%	120,000	90%	120,000	95%	120,000	95%	120,000	95%	555,000	BPKAD	
			3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	55%	170,000	60%	170,000	65%	170,000	70%	170,000	75%	170,000	75%	850,000	BPKAD	
			3.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	B / 68,35	BB / 74,00	120,000	BB / 76,00	100,000	BB / 76,00	120,000	BB / 76,00	120,000	A / 80,00	120,000	A / 80,00	580,000	BPKAD	
			3.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	595,360	2 Aplikasi	540,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	740,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	3,155,360	BPKAD	
					Opini Audit PBK	WTP/ 100 %	WTP/ 100 %	1,435,000	WTP/ 100 %	1,785,113	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	990,000	WTP/ 100 %	690,000	WTP/ 100 %	5,590,113	BPKAD	
					Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100%	1,116,493	100%	1,014,482	100%	1,490,000	100%	2,490,000	100%	3,754,000	100%	9,864,975	BPKAD	
			3.02.32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	16	16	700,000	17	600,000										BP2RD
					Jumlah Objek Pajak	548	603	2,055,280	663	1,615,000										BP2RD
					Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	4,40 %	4,65 %	400,000	4,92 %	400,000										BP2RD
					Persentase Peningkatan PAD	10	10	344,360	10	365,000										BP2RD
			3.02.52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	60 Bulan	6,430,190	BPKAD	
			3.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompentensi	80%	80%	850,000	80%	600,000	85%	800,000	90%	800,000	100%	800,000	100%	3,850,000	BPKAD	
			3.02.56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Persentase LHP yang ditindak lanjuti	84.71	84.71	200,100	100	309,100	100	309,100	100.0	309,100	100	309,100	100	1,436,500	BPKAD	
Persentase Kinerja Keuangan Daerah	60%	80%			250,000	80%	250,000	82%	250,000	84%	250,000	86%	250,000	86%	1,250,000	BPKAD				
3.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	42%	1,909,000	44%	1,400,000	46%	1,400,000	48%	1,200,000	50%	1,200,000	50%	7,109,000	BPKAD				
		Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	42%	200,000	44%	100,000	46%	100,000	48%	100,000	50%	150,000	50%	650,000	BPKAD				

Sumber : Renstra BPKAD 2016 - 2021

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Pelaksanaan Program / Kegiatan 3 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi Tahun 2017, 2018 dan 2019)

Sistem perencanaan dan penganggaran secara regulasi telah mengalami beberapa kali perubahan dalam penerapannya. Dari mulai menggunakan pendekatan tradisional hingga menjadi penganggaran berbasis kinerja (PBK). Perubahan ini ditandai dengan lahirnya beberapa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja terus melakukan perbaikan salah satunya melalui penataan arsitektur dan informasi kinerja. Penataan yang dilakukan tersebut bertujuan memperkuat pondasi sistem penganggaran berbasis kinerja. Sudah seharusnya proses perencanaan anggaran dengan cara melakukan *benchmarking* terkait penerapan reformasi pengelolaan keuangan publik untuk mendapatkan *best practices* yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Harmonisasi antara *satkeholder* diharapkan dapat menciptakan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Sejalan dengan itu, evaluasi kinerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai visi dan misi menjadi faktor utama yang bukan hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	U R	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,244,127,000.00	3,778,110,098.00	89.02
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Rupiah	45,000,000.00	44,697,000.00	99.33
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Rupiah	350,000,000.00	208,379,311.00	59.54
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input	Rupiah	100,000,000.00	99,660,000.00	99.66
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Rupiah	120,000,000.00	118,826,600.00	99.02
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Input	Rupiah	175,000,000.00	174,925,000.00	99.96
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Rupiah	501,250,000.00	337,025,000.00	67.24
		Output	Unit	40	35	87.50
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Rupiah	35,000,000.00	23,883,400.00	68.24
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Rupiah	146,000,000.00	142,895,000.00	97.87
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input	Rupiah	829,550,000.00	822,849,347.00	99.19
		Output	Kali	36	45	125.00
		Outcome	Persen	100.00	125.00	125.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Input	Rupiah	1,493,900,000.00	1,356,732,640.00	90.82
		Output	Orang	37	37	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Input	Rupiah	448,427,000.00	448,236,800.00	99.96
		Output	Kali	36	42	116.67
		Outcome	Persen	100.00	116.67	116.67
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			367,500,000.00	342,336,083.00	93.15
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input	Rupiah	170,000,000.00	147,612,000.00	86.83
		Output	Gedung	40	35	87.50
		Outcome	Persen	100.00	87.50	87.50
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input	Rupiah	90,000,000.00	87,239,083.00	96.93
		Output	Unit	23	23	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Rupiah	55,000,000.00	54,985,000.00	99.97
		Output	Unit	28	28	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00	69,276,900.00	92.37
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Input	Rupiah	75,000,000.00	69,276,900.00	92.37
		Output	Orang	5	5	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan			181,200,000.00	175,720,766.00	96.98
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input	Rupiah	181,200,000.00	175,720,766.00	96.98
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			6,363,868,000.00	5,655,657,265.00	88.87
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,588,205,000.00	1,498,891,903.00	94.38
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,172,965,000.00	1,071,451,943.00	91.35
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi	Input	Rupiah	304,950,000.00	175,276,349.00	57.48
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan	Input	Rupiah	326,450,000.00	303,067,377.00	92.84
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.18.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	399,950,000.00	320,951,448.00	80.25
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.22.	Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Input	Rupiah	151,560,000.00	145,392,804.00	95.93
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	1,872,266,000.00	1,824,935,003.00	97.47
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.56.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	291,840,000.00	78,013,000.00	26.73
		Output	Juknis	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Input	Rupiah	255,682,000.00	237,677,438.00	92.96
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			2,385,433,500.00	2,270,695,700.00	95.19
32.02.	Pendataan objek pajak	Input	Rupiah	321,322,000.00	295,615,906.00	92.00
		Output	Objek	500	500	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.03.	Penagihan wajib pajak	Input	Rupiah	92,360,000.00	91,404,000.00	98.96
		Output	Kecamatan	2	2	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.04.	Pemutakhiran data PBB	Input	Rupiah	278,000,000.00	244,977,850.00	88.12
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.06.	Rekonsiliasi retribusi	Input	Rupiah	39,280,000.00	39,280,000.00	100.00
		Output	Kali	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.09.	Analisa zona nilai tanah	Input	Rupiah	182,500,000.00	147,596,000.00	80.87
		Output	Kecamatan	8	8	100.00
		Outcome	Persen	90.00	90.00	100.00
32.11.	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Perpajakan	Input	Rupiah	58,100,000.00	53,033,000.00	91.28
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Input	Rupiah	719,591,500.00	719,023,444.00	99.92
		Output	Kali	9	9	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
32.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Input	Rupiah	442,280,000.00	434,564,500.00	98.26
		Output	SPPT	2,000	2,000	100.00
		Outcome	Persen	90.00	90.00	100.00
32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Input	Rupiah	252,000,000.00	245,201,000.00	97.30
		Output	Objek	43,445	43,445	100.00
		Outcome	Persen	75.00	75.00	100.00
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			2,362,577,000.00	2,299,533,744.00	97.33
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Input	Rupiah	296,900,000.00	264,008,257.00	88.92
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Input	Rupiah	209,500,000.00	209,207,000.00	99.86
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.04.	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Input	Rupiah	878,160,000.00	870,790,505.00	99.16
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.05.	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Input	Rupiah	148,700,000.00	144,011,800.00	96.85
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Input	Rupiah	829,317,000.00	811,516,182.00	97.85
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			438,170,000.00	374,784,900.00	85.53
53.02.	Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah	Input	Rupiah	438,170,000.00	374,784,900.00	85.53
		Output	Orang	150	150	100.00
		Outcome	Persen	80.00	80.00	100.00
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			594,700,000.00	526,909,035.00	88.60
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Input	Rupiah	293,400,000.00	248,180,403.00	84.59
		Output	Laporan	2	2	100.00
		Outcome	Persen	81.00	100.00	123.46
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Input	Rupiah	301,300,000.00	278,728,632.00	92.51
		Output	SKPD	45	45	100.00
		Outcome	Persen	60.00	60.00	100.00
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			4,001,558,000.00	3,248,289,561.00	81.18
57.01.	Sensus Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	1,687,205,000.00	1,435,792,837.00	85.10
		Output	Kali	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	262,464,000.00	238,813,600.00	90.99
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
57.03.	Penghapusan dan penindahtanganan barang milik daerah	Input	Rupiah	520,260,000.00	474,412,490.00	91.19
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	90.00	100.00	111.11
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Input	Rupiah	241,165,000.00	230,792,500.00	95.70
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	90.00	100.00	111.11
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset	Input	Rupiah	572,044,000.00	381,136,384.00	66.63
		Output	Kali	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	90.00	100.00	111.11
57.07.	Kajian Tentang Pemanfaatan Potensi BMD	Input	Rupiah	344,090,000.00	275,292,100.00	80.01
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	90.00	100.00	111.11
57.08.	Appraisal Aset /Barang Daerah	Input	Rupiah	374,330,000.00	212,049,650.00	56.65
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	42.00	42.00	100.00
				21,014,133,500.00	18,741,314,052.00	89.18

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2017

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2017 pada tabel diatas, penyerapan anggaran program dan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp18.741.314.052,00 atau 89,18% dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp21.014.133.500,00, target *output* dan *outcome* sesuai dengan yang direncanakan. Sisa anggaran sebesar 10,82% merupakan penghematan dari anggaran dan secara target kinerja telah terpenuhi.

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp13.443.279.985,00 atau sebesar 93,51% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp14.375.708.741,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penyerapan anggaran lebih besar namun dari sisi alokasi turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun hal ini tidak menjadi kinerja dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi tidak optimal, justru secara *output* dan *outcome* semua sudah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	U R	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,576,485,488.00	2,543,543,192.00	98.72
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Rupiah	40,000,000.00	39,975,000.00	99.94
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Rupiah	93,900,000.00	85,776,023.00	91.35
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input	Rupiah	100,000,000.00	99,540,000.00	99.54
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Rupiah	120,000,000.00	119,998,000.00	100.00
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Rupiah	185,000,000.00	184,995,000.00	100.00
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Rupiah	228,100,000.00	210,721,900.00	92.38
		Output	Unit	40	40	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Rupiah	32,200,000.00	27,105,000.00	84.18
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Rupiah	149,000,000.00	147,450,000.00	98.96
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input	Rupiah	600,100,000.00	600,097,517.00	100.00
		Output	Kali	34	34	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Input	Rupiah	743,047,488.00	743,011,752.00	100.00
		Output	Orang	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Input	Rupiah	285,138,000.00	284,873,000.00	99.91
		Output	Kali	18	18	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			270,900,000.00	268,322,605.00	99.05
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input	Rupiah	133,000,000.00	130,491,605.00	98.11
		Output	Unit	22	22	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Rupiah	85,400,000.00	85,331,000.00	99.92
		Output	Unit	30	30	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00	74,967,577.00	99.96
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Input	Rupiah	75,000,000.00	74,967,577.00	99.96
		Output	Orang	15	15	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			157,376,000.00	156,442,543.00	99.41
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input	Rupiah	157,376,000.00	156,442,543.00	99.41
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5,438,307,453.00	5,018,777,379.00	92.29
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,434,985,000.00	1,322,218,501.00	92.14
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,146,178,453.00	1,107,443,450.00	96.62
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	Input	Rupiah	258,185,000.00	184,290,255.00	71.38
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan	Input	Rupiah	298,910,000.00	282,283,594.00	94.44
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
17.18.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	480,250,000.00	424,795,881.00	88.45
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	1,483,679,000.00	1,430,361,147.00	96.41
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
17.56.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	83,120,000.00	77,560,997.00	93.31
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Input	Rupiah	253,000,000.00	189,823,554.00	75.03
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	95.00	100.00	105.26
32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			1,440,869,800.00	1,341,879,003.00	93.13
32.02.	Pendataan objek pajak	Input	Rupiah	87,344,000.00	77,294,000.00	88.49
		Output	Objek	500	500	100.00
		Outcome	Persen	95.00	100.00	105.26
32.03.	Penagihan wajib pajak	Input	Rupiah	72,882,000.00	65,162,184.00	89.41
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.04.	Pemutakhiran data PBB	Input	Rupiah	47,383,000.00	45,799,000.00	96.66
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.06.	Rekonsiliasi retribusi	Input	Rupiah	47,860,000.00	45,876,800.00	95.86
		Output	Kali	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
32.09.	Analisa zona nilai tanah	Input	Rupiah	175,980,000.00	160,172,600.00	91.02
		Output	Kecamatan	7	7	100.00
		Outcome	Persen	95.00	100.00	105.26
32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Input	Rupiah	335,123,000.00	335,031,269.00	99.97
		Output	Kali	9	9	100.00
		Outcome	Persen	95.00	100.00	105.26
32.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Input	Rupiah	563,382,000.00	509,648,400.00	90.46
		Output	SPPT PBB	40,000	40,000	100.00
		Outcome	Persen	95.00	100.00	105.26
32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Input	Rupiah	110,915,800.00	102,894,750.00	92.77
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			2,396,835,000.00	2,354,206,265.00	98.22
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Input	Rupiah	256,450,000.00	231,578,493.00	90.30
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Input	Rupiah	112,700,000.00	111,992,000.00	99.37
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Input	Rupiah	785,635,000.00	780,991,772.00	99.41
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.04.	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Input	Rupiah	1,242,050,000.00	1,229,644,000.00	99.00
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			901,366,000.00	678,111,216.00	75.23
56.02.	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran tahunan	Input	Rupiah	387,860,000.00	277,091,147.00	71.44
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	82.00	82.00	100.00
56.03.	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	Input	Rupiah	513,506,000.00	401,020,069.00	78.09
		Output	SKPD	45	45	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			1,118,569,000.00	1,007,030,205.00	90.03
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	100,060,000.00	99,020,000.00	98.96

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
57.03.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Input	Rupiah	191.813.000.00	138.895.600.00	72.41
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Input	Rupiah	174.706.000.00	173.649.600.00	99.40
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset	Input	Rupiah	170.190.000.00	161.300.200.00	94.78
		Output	Kali	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Input	Rupiah	362.390.000.00	321.218.105.00	88.64
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	65.00	65.00	100.00
57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Input	Rupiah	119.410.000.00	112.946.700.00	94.59
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
				14,375,708,741.00	13,443,279,985.00	93.51

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2018

Besaran anggaran dan maksimalnya penyerapan anggaran tidak menjamin kinerja dari suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu perlu pemahaman yang baik tentang anggaran itu sendiri. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp14.654.719.063,00 atau sebesar 92,76% dari alokasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp15.798.996.040,00. Untuk lebih jelas realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,014,606,040.00	2,787,928,740.00	92.48
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Rupiah	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Rupiah	318,150,000.00	159,867,500.00	50.25
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input	Rupiah	110,000,000.00	108,549,000.00	98.68
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Rupiah	150,000,000.00	149,916,000.00	99.94
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Rupiah	267,500,000.00	267,363,500.00	99.95
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Rupiah	343,800,000.00	330,183,500.00	96.04
		Output	Unit	40	40	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Rupiah	65,000,000.00	39,156,000.00	60.24
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Rupiah	125,000,000.00	119,640,000.00	95.71
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input	Rupiah	600,100,000.00	596,139,980.00	99.34
		Output	Kali	34	40	117.65
		Outcome	Persen	100.00	117.65	117.65
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Input	Rupiah	703,826,040.00	687,920,160.00	97.74
		Output	Orang	36	36	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Input	Rupiah	286,230,000.00	284,193,100.00	99.29
		Output	Kali	40	35	87.50
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			330,500,000.00	328,836,900.00	99.50
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input	Rupiah	192,800,000.00	191,506,900.00	99.33
		Output	Unit	22	22	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Rupiah	85,200,000.00	84,830,000.00	99.57
		Output	Unit	32	32	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			135,000,000.00	92,468,540.00	68.50
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Input	Rupiah	135,000,000.00	92,468,540.00	68.50
		Output	Orang	15	15	100.00
		Outcome	Persen	65.00	65.00	100.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan			104,616,000.00	94,871,117.00	90.69
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input	Rupiah	104,616,000.00	94,871,117.00	90.69
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			7,561,017,000.00	7,099,734,186.00	93.90
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,379,850,000.00	1,343,360,073.00	97.36
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,337,900,000.00	1,298,940,077.00	97.09
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	Input	Rupiah	519,630,000.00	484,457,257.00	93.23
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan	Input	Rupiah	689,470,000.00	630,705,739.00	91.48
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.18.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	572,450,000.00	516,278,722.00	90.19
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	865,902,000.00	831,342,933.00	96.01
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Input	Rupiah	354,512,000.00	307,108,644.00	86.63
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Input	Rupiah	1,841,303,000.00	1,687,540,741.00	91.65
		Output	Aplikasi	5	5	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			1,532,782,000.00	1,524,806,585.00	99.48
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Input	Rupiah	278,250,000.00	271,479,828.00	97.57
		Output	Bulan	12	12	100.00

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Input	Rupiah	394,500,000.00	394,211,000.00	99.93
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Input	Rupiah	860,032,000.00	859,115,757.00	99.89
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			82,450,000.00	74,162,784.00	89.95
53.03.	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	82,450,000.00	74,162,784.00	89.95
		Output	Orang	80	80	100.00
		Outcome	Persen	85.00	85.00	100.00
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			816,606,000.00	660,434,373.00	80.88
56.02.	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran daerah	Input	Rupiah	321,860,000.00	220,880,246.00	68.63
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	100.00	100.00	100.00
56.03.	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah			494,746,000.00	439,554,127.00	88.84
		Output	SKPD	45	45	100.00
		Outcome	Persen	80.00	80.00	100.00
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			2,221,419,000.00	1,991,475,838.00	89.65
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	166,078,000.00	147,204,080.00	88.64
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.03.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Input	Rupiah	276,242,000.00	218,088,552.00	78.95
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Input	Rupiah	312,982,000.00	267,730,385.00	85.54
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Input	Rupiah	653,187,000.00	602,992,739.00	92.32
		Output	Kali	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.06.	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	Input	Rupiah	211,216,000.00	197,396,000.00	93.46
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Input	Rupiah	336,327,000.00	326,978,484.00	97.22
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Input	Rupiah	265,387,000.00	231,085,598.00	87.07
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
				15,798,996,040.00	14,654,719,063.00	92.76

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2019

Tabel 4.4
Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan / dan Tindak Lanjut
			Output/Outcom	Anggaran	Output/Outcom	Anggaran	Output/Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi	12 Bulan	4,244,127,000	12	3,778,110,098	102.65	3,778,110,098		
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	45,000,000	12	44,697,000	100	44,697,000		
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	350,000,000	12	208,379,311	100	208,379,311		
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	100,000,000	12	99,660,000	100	99,660,000		
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000	12	118,826,600	100	118,826,600		
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	175,000,000	12	174,925,000	100	174,925,000		
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	501,250,000	35	337,025,000	87.5	337,025,000		
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	35,000,000	12	23,883,400	100	23,883,400		
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	146,000,000	12	142,895,000	100	142,895,000		
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36 kali	829,550,000	45	822,849,347	125	822,849,347		
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	1,493,900,000	37	1,356,732,640	100	1,356,732,640		
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36 kali	448,427,000	42	448,236,800	116.67	448,236,800		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65%	367,500,000	0.7	342,336,083	100	342,336,083		
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/gudang kantor	1 Gedung	52,500,000	1	52,500,000	100	52,500,000		
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	1 Gedung	170,000,000	1	147,612,000	100	147,612,000		
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	23 unit	90,000,000	23	87,239,083	100	87,239,083		
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	28 unit	55,000,000	28	54,985,000	100	54,985,000		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	12 Bulan	75,000,000	65,98%	69,276,900	100	69,276,900		
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	5 Orang	75,000,000	5	69,276,900	100	69,276,900		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	BB / 74,00	181,200,000	BB / 76,00	175,720,766	BB / 76,00	175,720,766		
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	181,200,000	3	175,720,766	100	175,720,766		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	6,363,868,000	WDP	5,655,657,265	100	5,655,657,265		
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,588,205,000	1	1,498,891,903	100	1,498,891,903		
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,172,965,000	1	1,071,451,943	100	1,071,451,943		
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	304,950,000	1	175,276,349	100	175,276,349		
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	326,450,000	1	303,067,377	100	303,067,377		
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	399,950,000	3	320,951,448	100	320,951,448		
17.22.	Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Ranperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	1 kegiatan	151,560,000	1	145,392,804	100	145,392,804		
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	1,872,266,000	1	1,824,935,003	100	1,824,935,003		
17.56.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	Jumlah pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah	1 Juknis	291,840,000	1	78,013,000	100	78,013,000		
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	255,682,000	12	237,677,438	100	237,677,438		

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan / dan Tindak Lanjut
			Output/Outcom	Anggaran	Output/Outcom	Anggaran	Output/Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.03.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang ditagih	70%	2,385,433,500	95%	2,270,695,700	100	2,270,695,700		
32.02.	Pendataan objek pajak	Jumlah kecamatan yang dimukhtahirkan data PBBP2	2 Kec	321,322,000	2	295,615,906	100	295,615,906		
32.03.	Penagihan wajib pajak	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi retribusi	4 kali	92,360,000	4	91,404,000	100	91,404,000		
32.04.	Pemutakhiran data PBB	Jumlah kecamatan yang dianalisa nilai tanah	3 Kec	278,000,000	3	244,977,850	100	244,977,850		
32.06.	Rekonsiliasi retribusi	Jumlah rekonsiliasi data retribusi	8 kali	39,280,000	8	39,280,000	100	39,280,000		
32.09.	Analisa zona nilai tanah	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	12 Kali	182,500,000	12	147,596,000	100	147,596,000		
32.11.	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Perpajakan	Pengembangan aplikasi perpajakan	12 Bulan	58,100,000	12	53,033,000	100	53,033,000		
32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9 Kali	719,591,500	9	719,023,444	100	719,023,444		
32.13.	Penetapan Obejek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Penyampaian SPPT PBB dari desa / kelurahan	2000 SPPT	442,280,000	2000	434,564,500	69.05	434,564,500		
32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Jumlah objek PBB-P2	43.445 Objek	252,000,000	43445	245,201,000	52.85	245,201,000		
52	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	2,362,577,000	12	2,299,533,744	100	2,299,533,744		
52.01.	Penyelenggaraan pelayanan penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	296,900,000	12	264,008,257	100	264,008,257		
52.02.	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD), anggaran kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	209,500,000	12	209,207,000	100	209,207,000		
52.03.	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	4 Kali	829,317,000	12	811,516,182	100	811,516,182		
52.04.	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Informasi keuangan daerah	1 Laporan	878,160,000	1	870,790,505	100	870,790,505		
52.05.	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Informasi SKPD	1 Laporan	148,700,000	1	144,011,800	100	144,011,800		
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase peserta yang bersertifikat	60%	438,170,000	0.8553	374,784,900	100	374,784,900		
53.03.	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	Jumlah Peserta	150 Orang	438,170,000	150	374,784,900	100	374,784,900		
56	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	594,700,000	WTP	526,909,035	WTP	526,909,035		
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	293,400,000	1	248,180,403	100	248,180,403		
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah aparat yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	301,300,000	42	278,728,632	100	278,728,632		
57	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	42%	4,001,558,000	63,17%	3,248,289,561	1	3,248,289,561		
57.01.	Sensus Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang disensus	1 Kali	1,687,205,000	1	1,435,792,837	100	1,435,792,837		
57.02.	Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	Frekuensi pelaksanaan sensus	1 kali	262,464,000	1	238,813,600	100	238,813,600		
57.03.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah	1 laporan	520,260,000	1	474,412,490	100	474,412,490		
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	241,165,000	1	230,792,500	100	230,792,500		
57.05.	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	572,044,000	1	381,136,384	100	381,136,384		
57.06.	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Laporan	344,090,000	1	275,292,100	100	275,292,100		
57.08.	Appraisal aset/barang daerah	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	374,330,000	1	212,049,650	100	212,049,650		
TOTAL				21,014,133,500		18,741,314,052		18,741,314,052		

Sumber : Data olahan

Tabel 4.5
Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan / dan Tindak Lanjut
			Output/Outcom	Anggaran	Output/Outcom	Anggaran	Output/Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi	12 Bulan	2,576,485,488	12	2,543,543,192	102.65	2,543,543,192		
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	40,000,000	12	39,975,000	100	39,975,000		
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	93,900,000	12	85,776,023	100	85,776,023		
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	100,000,000	12	99,540,000	100	99,540,000		
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000	12	119,998,000	100	119,998,000		
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	185,000,000	12	184,995,000	100	184,995,000		
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	228,100,000	35	210,721,900	87.5	210,721,900		
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	32,200,000	12	27,105,000	100	27,105,000		
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	149,000,000	12	147,450,000	100	147,450,000		
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi luar daerah	34 kali	600,100,000	34	600,097,517	125	600,097,517		
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	743,047,488	37	743,011,752	100	743,011,752		
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	18 kali	285,138,000	18	284,873,000	116.67	284,873,000		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65%	270,900,000	99%	268,322,605	100	268,322,605		
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/gudang kantor	1 Gedung	52,500,000	1	52,500,000	100	52,500,000		
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	22 unit	133,000,000	22	130,491,605	100	130,491,605		
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	30 Unit	85,400,000	30	85,331,000	100	85,331,000		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	55%	75,000,000	99%	74,967,577	100	74,967,577		
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	75,000,000	15	74,967,577	100	74,967,577		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	BB / 74,00	157,376,000	BB / 74,00	156,442,543	BB / 76,00	156,442,543		
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	157,376,000	3	156,442,543	100	156,442,543		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	5,438,307,453	WTP	5,018,777,379	100	5,018,777,379		
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,434,985,000	1	1,322,218,501	100	1,322,218,501		
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,146,178,453	1	1,107,443,450	100	1,107,443,450		
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	258,185,000	1	184,290,255	100	184,290,255		
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	298,910,000	1	282,283,594	100	282,283,594		
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	480,250,000	3	424,795,881	100	424,795,881		
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	1,483,679,000	1	1,430,361,147	100	1,430,361,147		
17.56.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	Jumlah pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah	1 Juknis	83,120,000	1	77,560,997	100	77,560,997		
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	253,000,000	12	189,823,554	100	189,823,554		
32.03.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang ditagih	548 Objek	1,440,869,800	329	1,341,879,003	100	1,341,879,003		
32.02.	Pendataan objek pajak	Jumlah kecamatan yang dimukhtahirkan data PBBP2	2 Kec	87,344,000	2	77,294,000	100	77,294,000		

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan / dan Tindak Lanjut
			Output/Outcom	Anggaran	Output/Outcom	Anggaran	Output/Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.03.	Penagihan wajib pajak	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi retribusi	3 kali	72,882,000	3	65,162,184	100	65,162,184		
32.04.	Pemutakhiran data PBB	Jumlah kecamatan yang dianalisa nilai tanah	2 Kec	47,383,000	2	45,799,000	100	45,799,000		
32.06.	Rekonsiliasi retribusi	Jumlah rekonsiliasi data retribusi	1 aplikasi	47,860,000	1	45,876,800	100	45,876,800		
32.09.	Analisa zona nilai tanah	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9 Kali	175,980,000	9	160,172,600	100	160,172,600		
32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9 Kali	335,123,000	9	335,031,269	100	335,031,269		
32.13.	Penetapan Obejek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Penyampaian SPPT PBB dari desa / kelurahan	2000 SPPT	563,382,000	1,381	509,648,400	69.05	509,648,400		
32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Jumlah objek PBB-P2	43.445 Obiek	110,915,800	22,960	102,894,750	52.85	102,894,750		
52	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	2,396,835,000		2,354,206,265	100	2,354,206,265		
52.01.	Penyelenggaraan pelayanan penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	256,450,000	12	231,578,493	100	231,578,493		
52.02.	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD), anggaran kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	112,700,000	12	111,992,000	100	111,992,000		
52.03.	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	4 Kali	785,635,000	4	780,991,772	100	780,991,772		
52.04.	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Informasi keuangan daerah	1 Laporan	1,242,050,000	1	1,229,644,000	100	1,229,644,000		
56	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	901,366,000	WTP	678,111,216	WTP	678,111,216		
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	387,860,000	1	277,091,147	100	277,091,147		
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah aparaturnya yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	513,506,000	45	401,020,069	100	401,020,069		
57	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	42%	1,118,569,000	90%	1,007,030,205	1	1,007,030,205		
57.02.	Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	Frekuensi pelaksanaan sensus	1 kali	100,060,000	1	99,020,000	100	99,020,000		
57.03.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah	1 laporan	191,813,000	1	138,895,600	100	138,895,600		
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	174,706,000	1	173,649,600	100	173,649,600		
57.05.	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	170,190,000	1	161,300,200	100	161,300,200		
57.08.	Appraisal aset/barang daerah	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	362,390,000	1	321,218,105	100	321,218,105		
57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Dokumen pemanfaatan BMD meningkat PAD	1 dokumen	119,410,000	1	112,946,700	100	112,946,700		
TOTAL				14,375,708,741		13,443,279,985		13,443,279,985		

Sumber : Data olahan

Tabel 4.6
Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan / dan Tindak Lanjut
			Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran	Output/ Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi	12 Bulan	3,014,606,040	12	2,787,928,740	102.65	2,787,928,740		
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	45,000,000	12	45,000,000	100	45,000,000		
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	318,150,000	12	159,867,500	100	159,867,500		
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	110,000,000	12	108,549,000	100	108,549,000		
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	150,000,000	12	149,916,000	100	149,916,000		
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	267,500,000	12	267,363,500	100	267,363,500		
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	343,800,000	35	330,183,500	87.5	330,183,500		
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	65,000,000	12	39,156,000	100	39,156,000		
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	125,000,000	12	119,640,000	100	119,640,000		
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	34 kali	600,100,000	40	596,139,980	125	596,139,980		
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	36 Orang	703,826,040	36	687,920,160	100	687,920,160		
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	40 Kali	286,230,000	40	284,193,100	116.67	284,193,100		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65%	330,500,000	99%	328,836,900	100	328,836,900		
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/gudang kantor	1 Gedung	52,500,000	1	52,500,000	100	52,500,000		
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	22 Unit	192,800,000	22	191,506,900	100	191,506,900		
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	32 Unit	85,200,000	32	84,830,000	100	84,830,000		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	60%	135,000,000	89.95%	92,468,540	100	92,468,540		
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	135,000,000	15	92,468,540	100	92,468,540		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	BB / 74,00	104,616,000	BB / 76,00	94,871,117	BB / 76,00	94,871,117		
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	104,616,000	3	94,871,117	100	94,871,117		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	7,561,017,000	WTP	7,099,734,186	100	7,099,734,186		
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,379,850,000	1	1,343,360,073	100	1,343,360,073		
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,337,900,000	1	1,298,940,077	100	1,298,940,077		
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	519,630,000	1	484,457,257	100	484,457,257		
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	689,470,000	1	630,705,739	100	630,705,739		
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	572,450,000	3	516,278,722	100	516,278,722		
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	865,902,000	1	831,342,933	100	831,342,933		
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	354,512,000	12	307,108,644	100	307,108,644		
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Laporan SIKD	5 Aplikasi	1,841,303,000	5 Aplikasi	1,687,540,741	100	1,687,540,741		
52	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	1,532,782,000	12	1,524,806,585	100	1,524,806,585		
52.01.	Penyelenggaraan pelayanan penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	278,250,000	12	271,479,828	100	271,479,828		
52.02.	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD), anggaran kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	394,500,000	12	394,211,000	100	394,211,000		
52.03.	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	4 Kali	860,032,000	4	859,115,757	100	859,115,757		

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Permasalahan / dan Tindak Lanjut
			Output/Outcom	Anggaran	Output/Outcom	Anggaran	Output/Outcom	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase peserta yang bersertifikat	85%	82,450,000	100%	74,162,784	100	74,162,784		
53.03.	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	Jumlah Peserta	80 Orang	82,450,000	80	74,162,784	100	74,162,784		
56	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	816,606,000	WTP	660,434,373	WTP	660,434,373		
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	321,860,000	1	220,880,246	100	220,880,246		
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	494,746,000	45	439,554,127	100	439,554,127		
57	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	80%	2,221,419,000	89%	1,991,475,838	1	1,991,475,838		
57.02.	Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah	1 kali	166,078,000	1	147,204,080	100	147,204,080		
57.03.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 laporan	276,242,000	1	218,088,552	100	218,088,552		
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	312,982,000	1	267,730,385	100	267,730,385		
57.05.	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Laporan	653,187,000	1	602,992,739	100	602,992,739		
57.06.	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	Penilaian aset tanah milik daerah	1 Laporan	211,216,000	1	197,396,000	100	197,396,000		
57.08.	Appraisal aset/barang daerah	Laporan mutasi barang milik daerah	1 Kali	336,327,000	1	326,978,484	100	326,978,484		
57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Jumlah laporan BMD	1 Dokumen	265,387,000	1	231,085,598	100	231,085,598		
TOTAL				15,798,996,040		14,654,719,063		14,654,719,063		

Sumber : Data olahan

B. Program/Kegiatan dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2020

Target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya ditetapkan dengan DPA-SKPD. Berbicara mengenai target kinerja akan berhubungan dengan sistem pengendalian hasil. Apabila suatu target salah ditetapkan, atau target disusun dengan cara yang tidak benar, maka sistem pengendalian akan menghasilkan pekerjaan yang tidak optimal.

Penetapan target yang *achievable* juga mesti memperhatikan prinsip “*stretching goals*” (atau menggantungkan target setinggi dan sejauh mungkin). Berbagai pengalaman di beragam organisasi menunjukkan, penetapan target yang sangat menantang (*very challenging goals*) memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pegawai secara dramatis. Sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan juga menjadi lebih tajam dan bersifat kritikal bagi peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan.

Untuk lebih jelasnya target program dan kegiatan pada tahun 2020, seperti yang ditampilkan dibawah ini:

Tabel 4.7
Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Keterangan
			Output/Outcome	Anggaran	
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi	12 Bulan	2,860,109,015.00	
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	45,000,000.00	
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	555,510,000.00	
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	114,800,000.00	
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000.00	
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	210,000,000.00	
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	261,800,000.00	
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	55,000,000.00	
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	17,000,000.00	
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36 kali	500,900,000.00	
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	593,541,015.00	
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36 Kali	386,558,000.00	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65%	312,500,000.00	
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/gudang kantor	1 Gedung	52,500,000.00	
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Gedung	50,000,000.00	
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit	140,000,000.00	
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	34 Unit	70,000,000.00	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi		45,000,000.00	
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	45,000,000.00	
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	BB / 75,00	100,780,000.00	
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	100,780,000.00	
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	8,163,655,953.00	
17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Perbup tentang juknis kebijakan akuntansi	1 Perbup	186,620,000.00	
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,124,050,000.00	
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,130,050,000.00	
17.10.	Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	524,690,000.00	
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	558,580,000.00	

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja		Keterangan
			Output/Outcome	Anggaran	
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	597,310,000.00	
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	Validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 Kegiatan	716,710,000.00	
17.29.	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah koordinasi keuangan daerah	12 Kali	939,613,753.00	
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	366,600,000.00	
17.90.	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi BMD	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi BMD	2 Aplikasi	286,400,000.00	
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Laporan SIKD	5 Aplikasi	1,733,032,200.00	
41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPM	82%	500,000,000.00	
41.06.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPM	1 Dokumen	300,000,000.00	
41.07.	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPM	1 Dokumen	200,000,000.00	
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	1,426,375,000.00	
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	270,000,000.00	
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	13 Bulan	378,600,000.00	
52.04.	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Informasi keuangan daerah	14 Bulan	266,710,000.00	
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	4 Kali	511,065,000.00	
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase peserta yang bersertifikat	85%	326,942,000.00	
53.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah Peserta	48 Orang	326,942,000.00	
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	803,546,000.00	
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 Laporan	321,860,000.00	
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	481,686,000.00	
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	80%	2,690,238,000.00	
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah	1 Laporan	200,000,000.00	
57.03.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	382,436,000.00	
57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	470,049,000.00	
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	545,854,000.00	
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Penilaian aset tanah milik daerah	1 Kegiatan	360,000,000.00	
57.09.	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	Laporan mutasi barang milik daerah	1 Laporan	300,000,000.00	
57.10.	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah laporan BMD	1 Laporan	431,899,000.00	
Total				17,229,145,968.00	

Sumber : Data Olahan

C. Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017, 2018 dan 2019

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Berikut disajikan Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Capaian Program RPJMD 2016 - 2021
Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun 2017, 2018 & 2019

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Target RPJMD Kabupaten pada RKPd Kabupaten Tahun ke												Capaian Target (Realisasi) RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun ke-4						Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun ke-4						Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
						1		2		3		4		5		1		2		3		1		2		3		18		19			
						2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2019		2017		2018		2019							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya fasilitas pendukung kelembagaan untuk pelayanan administrasi publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	60	#####	12	2,236,643	12	1,917,200	12	2,067,200	12	2,067,200	12	2,353,200	12	3,776,110	12	1,917,200	12	2,860,109	100	168.92	100.00	100.00	100	138.36	36	8,555,419	60	80.40	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	75	1,225,000	65	949,000	65	219,000	70	219,000	70	219,000	75	219,000	100	342,336	100	219,000	100	92,469	153.85	98.09	153.85	100.00	142.86	42.22	300	653,805	400	53.37	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	85%	95	555,000	85	75,000	90	120,000	95	120,000	95	120,000	-	-	100	120,000					111.11	100.00			100	120,000	105	21.62			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	75	850,000	55	170,000	60	170,000	65	170,000	70	170,000	75	170,000	120	69,276	120	170,000	100	94,871	218.18	40.75	200.00	100.00	153.85	55.81	340	334,147	453	39.31	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	B / 68,35	A / 80,00	580,000	BB / 74,00	120,000	BB / 76,00	100,000	BB / 76,00	120,000	BB / 76,00	120,000	A / 80,00	120,000	92.36	175,720	92.36	100,000	A / 80,00	100,780	1.25	146.43	1.25	100.00	1.25	83.98	1.25	376,500	1.25	64.91	
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah	2 Aplikasi	2	3,155,360	2	595,360	2	540,000	2	640,000	2	740,000	2	640,000	2	595,360	2	540,000	2	630,706	100	100.00	100	100.00	100	98.55	6	1,766,066	300	55.97	
		Opini Audit BPK	WTP	WTP	5,590,113	WTP	1,435,000	WTP	1,785,113	WTP	690,000	WTP	990,000	WTP	690,000	68	1,435,000	75	1,785,113	WTP	1,115,163	WDP	100.00	WDP	100.00	WDP	161.62	WDP	4,335,276	WTP	77.55		
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100	9,864,975	100	1,116,493	100	1,014,482	100	1,490,000	100	2,490,000	100	3,754,000	93.33	1,116,493	100	1,014,482	100	831,343	93.33	100.00	100.00	100.00	100.00	55.79	293.33	2,962,318	293	30.03		
		Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Mekanisme Pajak dan Retribusi Daerah	16	18	3,100,000	16	700,000	17	600,000	17	600,000	17	600,000	18	600,000	18	700,000	54.56	600,000			100	100.00	100	100.00	100	0.00	72.56	1,300,000	403	41.94	
			Jumlah Objek Pajak	141	198	#####	160	2,055,280	169	1,615,000	179	2,069,595	188	2,269,595	198	2,069,595	88.75	2,055,280	100	1,615,000			55.47	100.00	59.17	100.00	0.00	0.00	188.75	3,670,280	95	36.41	
			Persentase PAD Terhimpun Pemerintah Daerah	4.40 %	5.64	2,000,000	4.65	400,000	4.92	400,000	4.69	400,000	5.05	400,000	5.64	400,000	5.52	400,000	5.52	400,000			4.65	100.00	4.92	100.00	4.69	0.00	11.04	800,000	196	40.00	
		Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Terbentuk administrasi keuangan daerah	12 Bulan	60	6,430,190	12	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	100	1,230,190	100	1,450,000	100	1,524,807	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	127.07	300	4,204,997	500	65.39	
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompentensi	80%	100	3,850,000	80	850,000	80	600,000	85	800,000	90%	800,000	100	800,000	100	850,000	100	600,000	100	74,163	125	100.00	125	100.00	117.6471	9.27	300	1,524,163	300	39.59	
		Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	WTP	1,436,500	WTP	200,100	WTP	309,100	WTP	309,100	WTP	309,100	WTP	309,100	68	200,100	100	309,100	WTP	220,880	WDP	100.00	WDP	100.00	WDP	71.46	WDP	730,080	WTP	50.82	
			Persentase Kinerja Keuangan Daerah	60%	86	1,250,000	80	250,000	80	250,000	82	250,000	84	250,000	86	250,000	100	250,000	100	250,000	86	439,554	125	100.00	125	100.00	104.878	175.82	286	939,554	333	75.16	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	50	7,109,000	42	1,909,000	44	1,400,000	46	1,400,000	48	1,200,000	50	1,200,000	100	1,909,000	100	1,400,000	50	1,723,745	238.10	100.00	227.27	100.00	108.70	123.12	250	5,032,745	500	70.79	
			Persentase pengamanan barang milik daerah	40%	50	650,000	42	200,000	44	100,000	46	100,000	48	100,000	50	150,000	100	200,000	100	100,000	50	267,730	2.381	100.00	2.273	100.00	1.087	267.73	250	567,730	500	87.34	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian																																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																	
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya																																	
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya																																	

Sumber : Data Olahan

D. Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, 2018 dan 2019

Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pendukung Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016 - 2021 yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019.

Tabel 4.9
Capaian Indikator Pembangunan Daerah RPJMD 2016 - 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna

No	Fokus/Bidang Urusan/ indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021	Target					Realisasi			Capaian (%)			Capaian Terhadap RPJMD (%)	Keterangan (Tercapai/ Belum Tercapai)	Keterangan	
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	60	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100.00			
3.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	60	75	65	65	70	70	75	65	65	100	100	100	75	91.67			
3.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%	85	95	65	90	90	95	95	85	85	100	100	100	66.67				
3.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	50	75	55	60	65	65	75	66	66	100	120	120	75	105.00			
3.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	B / 68,35	A / 80,00	BB / 74,00	BB / 76,00	BB / 76,00	BB / 76,00	A / 80,00	B	BB	80,00	92	92,36	92,36	92,36			
3.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100.00			
		%	100	100	100	100	100	100	100	100	75	75	75	75	75	75	75.00		
		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00		
3.02.32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	16	875	16	17				548	329	100	54,56			77,28			
		%	141	18	160	169				16	16	100	100			100,00			
		%	4,40	5,65	4,65	4,95				25,64	25,64		551	551,40			551,40		
		%	12	30	10	12				10	10	100	100			100,00			
3.02.52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Bulan	12	60	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100.00			
3.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	%	100	100	80	100	100	100	100	80	80	100	100	100	100	100.00			
3.02.56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	%	60	100	100	80	82	84	86	100	100	100	100	100	100	100.00			
		%	40	86	80	44	46	48	50	80	80	86	100	100	100	100.00			
3.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	%	40	50	42	44	46	48	50	42	42	50	100	100	100	100.00			
		%	40	50	42	42	46	48	50	42	42	50	100	100	100	100.00			

Sumber : Data Olahan

E. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik Pusat, Provinsi, Kabupaten dengan Kabupaten Lainnya

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian kerjasama, sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan Bank Riau Kepri Cabang Ranai.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 menyatakan Kepala Daerah menunjuk Bank Umum dalam mengelola uang daerah untuk menyimpan penerimaan dan pengeluaran. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang: **“Pemanfaatan Fasilitas Perbankan dalam Rangka Pengelolaan Dana Kas yng Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna”** Nomor: 006/Mou/2018 dan Nomor :007/RNI/2018, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 09 Agustus 2018.

2. Kerjasama dengan Bank Mandiri Kantor Cabang Natuna.

Atas Nama Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Mandiri (Persero) KCP. Natuna Tentang: **“Pengelolaan Dana Kas Pemerintah Kabupaten Natuna”** Nomor: 08/Mou/BPKAD/IX/2014 dan Nomor :1.SP.NTN/470/2014, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 16 September 2014.

3. Kerjasama dengan BPJS dalam Pelayanan Kesehatan PNS.

Atas Nama Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Tanjungpinang Tentang: **“Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Pegawai PTT, GTT dan PTT Paramedis Pemerintah Kabupaten Natuna”** Nomor: 180/HK-PK/36/2019 dan Nomor :PKS/002/112019, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 17 November 2019.

F. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan untuk menuju perampingan ukuran dan komponen birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara *gradual* terhadap nilai (*public value*) dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa menjadi pelayanan dan pengayoman masyarakat.

Perubahan struktural seharusnya diikuti oleh perubahan kultural, berupa internalisasi *mindset* dan perilaku, serta revitalisasi etos kerja. Beranjak dari keinginan untuk melepaskan diri dari budaya birokratis yang kaku dan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah Daerah di pacu untuk membuat inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sekaligus menjawab amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pasal 11 dimana penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing.

Penyelenggaraan inovasi Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya dikenal dengan *Integrated Natuna Financial Information System* (Sistem Informasi Keuangan Natuna Terintegrasi) yang selanjutnya disingkat iNFIS adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. iNFIS terdiri dari beberapa modul dasar, yaitu Modul Perencanaan, Penganggaran, Perbendaharaan, BMD, Tepra, Monitoring, serta Pelaporan. Kedepannya akan dikembangkan juga modul-modul lain, seperti modul Kepegawaian, Absensi, Penggajian, Perjalanan Dinas dan setiap tahun selalu menambah modul serta menyesuaikan dengan perubahan regulasi. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Natuna dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainya serta yang paling penting adalah meningkatkan pelayanan publik dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.

BAB V

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI

Realisasi dan capaian kinerja yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan refleksi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut secara ringkas akan dijelaskan sesuai dengan bidang yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas yaitu menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dalam hal ini melaksanakan 4 (empat) program dan 16 (enam belas) kegiatan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan sebesar Rp3.014.6060.040,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.787.928.740,00 atau mencapai 92,48 % merupakan akumulasi dari 11 (sebelas) kegiatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi sebesar Rp328.836.900,00 atau sebesar 99,50% dari total anggaran yaitu sebesar Rp330.500.000,00 dalam 3 (tiga) kegiatan. Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan dengan alokasi sebesar Rp135.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp92.468.540,00 atau realisasi sebesar 68,50%. Sedangkan untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi sebesar Rp104.616.000,00 dengan realisasi Rp94.871.117,00 atau sebesar 90,69%. Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2019

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,014,606,040.00	2,787,928,740.00	92.48
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Rupiah	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	Input	Rupiah	318,150,000.00	159,867,500.00	50.25
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input	Rupiah	110,000,000.00	108,549,000.00	98.68
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Rupiah	150,000,000.00	149,916,000.00	99.94
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Rupiah	267,500,000.00	267,363,500.00	99.95
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Rupiah	343,800,000.00	330,183,500.00	96.04
		Output	Unit	40	40	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Rupiah	65,000,000.00	39,156,000.00	60.24
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Rupiah	125,000,000.00	119,640,000.00	95.71
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input	Rupiah	600,100,000.00	596,139,980.00	99.34
		Output	Kali	34	40	117.65
		Outcome	Persen	100.00	117.65	117.65
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Input	Rupiah	703,826,040.00	687,920,160.00	97.74
		Output	Orang	36	36	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Input	Rupiah	286,230,000.00	284,193,100.00	99.29
		Output	Kali	40	40	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			330,500,000.00	328,836,900.00	99.50
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input	Rupiah	192,800,000.00	191,506,900.00	99.33
		Output	Unit	22	22	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Input	Rupiah	85,200,000.00	84,830,000.00	99.57
		Output	Unit	32	32	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			135,000,000.00	92,468,540.00	68.50
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Input	Rupiah	135,000,000.00	92,468,540.00	68.50
		Output	Orang	15	15	100.00
		Outcome	Persen	65.00	65.00	100.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			104,616,000.00	94,871,117.00	90.69
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Input	Rupiah	104,616,000.00	94,871,117.00	90.69
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
				3,584,722,040.00	3,304,105,297.00	92.17

Sumber : Data LRA TA. 2019

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran memiliki tugas yaitu merumuskan prosedur penyusunan rancangan Perubahan APBD, pengendalian penyusunan anggaran, dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja, pelaporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, investasi jangka pendek, tunjangan profesi guru PNSD, Tambahan Penghasilan guru PNSD dan Piutang yang dalam hal ini melaksanakan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian realisasi 2 (dua) program yaitu sebesar Rp6.020.299.581,00 atau sebesar 95,79% dari total anggaran yaitu sebesar Rp6.284.987.000,00 dengan rincian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi sebesar Rp5.161.183.824,00 atau sebesar 95,14% dari total anggaran yaitu sebesar Rp5.424.955.000,00. Sedangkan untuk Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah dialokasikan sebesar Rp860.032.000,00 dengan realisasi sebesar 99,89% atau Rp859.115757,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2
Laporan Realisasi Anggaran Bidang Anggaran Tahun 2019

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan			5,424,955,000.00	5,161,183,824.00	95.14
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,379,850,000.00	1,343,360,073.00	97.36
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja	Input	Rupiah	1,337,900,000.00	1,298,940,077.00	97.09
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	865,902,000.00	831,342,933.00	96.01
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Input	Rupiah	1,841,303,000.00	1,687,540,741.00	91.65
		Output	Aplikasi	5	5	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			860,032,000.00	859,115,757.00	99.89
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Input	Rupiah	860,032,000.00	859,115,757.00	99.89
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
				6,284,987,000.00	6,020,299,581.00	95.79

Sumber : Data LRA TA. 2019

3. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dalam hal ini melaksanakan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan. Total realisasi sebesar Rp3.264.675.563,00 atau sebesar 90,05% dari pagu anggaran sebesar Rp3.625.418.000,00. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dialokasikan sebesar Rp2.136.062.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.938.550.362,00 atau sebesar 90,75% yang tersebar pada 4 (empat) kegiatan. Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah terdapat 2 (dua) kegiatan dengan realisasi Rp665.690.828,00 atau 98,95% dari pagu alokasi sebesar Rp672.750.000,00. Untuk Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp816.606.000,00 dengan realisasi Rp660.434.373,00 atau

sebesar 80,88% dari 2 (dua) kegiatan. Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Akutansi Keuangan Daerah Tahun 2019

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan			2,136,062,000.00	1,938,550,362.00	90.75
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi	Input	Rupiah	519,630,000.00	484,457,257.00	93.23
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi	Input	Rupiah	689,470,000.00	630,705,739.00	91.48
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.18.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	572,450,000.00	516,278,722.00	90.19
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Input	Rupiah	354,512,000.00	307,108,644.00	86.63
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			672,750,000.00	665,690,828.00	98.95
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Input	Rupiah	278,250,000.00	271,479,828.00	97.57
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan	Input	Rupiah	394,500,000.00	394,211,000.00	99.93
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	90.00	100.00	111.11
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan			816,606,000.00	660,434,373.00	80.88
56.02.	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi	Input	Rupiah	321,860,000.00	220,880,246.00	68.63
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	100.00	100.00	100.00
56.03.	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah			494,746,000.00	439,554,127.00	88.84
		Output	SKPD	45	45	100.00
		Outcome	Persen	80.00	80.00	100.00
				3,625,418,000.00	3,264,675,563.00	90.05

Sumber : Data LRA TA. 2019

4. Bidang Aset

Bidang Aset memiliki tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang dalam hal ini melaksanakan kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp2.065.638.622,00

atau sebesar 89,66% dari total alokasi sebesar Rp2.303.869.000,00. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan sebesar Rp82.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp74.162.784,00 atau 89,95%. Sedangkan Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp1.991.475.838,00 atau 89,65% dari total pagu sebesar Rp2.221.419.000,00. Berikut disajikan laporan realisasi bidang aset sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.4
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Aset TA. 2019

No	URAIAN	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola			82,450,000.00	74,162,784.00	89.95
53.03.	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	82,450,000.00	74,162,784.00	89.95
		Output	Orang	80	80	100.00
		Outcome	Persen	85.00	85.00	100.00
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan			2,221,419,000.00	1,991,475,838.00	89.65
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	166,078,000.00	147,204,080.00	88.64
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.03.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Input	Rupiah	276,242,000.00	218,088,552.00	78.95
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Input	Rupiah	312,982,000.00	267,730,385.00	85.54
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Input	Rupiah	653,187,000.00	602,992,739.00	92.32
		Output	Kali	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
57.06.	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	Input	Rupiah	211,216,000.00	197,396,000.00	93.46
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Input	Rupiah	336,327,000.00	326,978,484.00	97.22
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	50.00	108.70
57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Input	Rupiah	265,387,000.00	231,085,598.00	87.07
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	46.00	46.00	100.00
				2,303,869,000.00	2,065,638,622.00	89.66

Sumber : Data LRA TA. 2019

BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna merupakan pendukung atas keberhasilan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2016 - 2021, Terhadap misi yang diemban oleh **Kepala daerah Kabupaten Natuna 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi pelaksana dan penunjang dari segi pengelolaan keuangan dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan memberikan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD dan masyarakat luas yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut, dari segi pengelolaan keuangan.**

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan Program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Natuna adalah ***“Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan”*** dengan Indikator Program (*Outcome*) ***“Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku”***, untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung visi dan misi RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Natuna. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menetapkan rencana kinerja serta untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan meliputi 3 (tiga) sasaran strategis yang tercermin dari 4 (empat) indikator sasaran yang dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan.

Secara umum 2 (dua) Sasaran strategis yang tercakup dalam 5 (lima) program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 dapat dicapai sepenuhnya atau lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan hal ini menunjukkan adanya komitmen penuh dari pimpinan beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2019.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merekomendasikan program kegiatan untuk Rencana Kerja 2020 sebagai berikut:

1. Merekomendasi untuk melanjutkan program kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2020, untuk peningkatan sumber daya manusia ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pemahaman laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
2. Merekomendasi untuk melanjutkan program kegiatan yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia untuk tata kelola aset.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Merekomendasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, guna mendukung transparansi dan akuntabelitas pengelolaan keuangan daerah.